

# Islamic Education in The Archipelago Before Independence Case Study: Dutch Colonial Political Policy Towards Islamic Education In Indonesia

Muthia Azizah<sup>1\*</sup>, Zulmuqim<sup>2</sup>, Muhammad Zalnur<sup>3</sup> 

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

20 December 2023

Received in revised form

24 December 2023

Accepted 18 December 2023

### Kata Kunci:

Islam, Kolonial, Pendidikan

### Keywords:

Colonial, Education Islam

DOI: <https://dx.doi.org/>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Nusantara sebelum kemerdekaan Indonesia dan bagaimana kebijakan politik pada masa kolonial Belanda terhadap Pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Bahwasanya pendidikan Islam sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dan semakin berkembang setelah Indonesia merdeka dan semakin tersebar nya tokoh agama diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Belanda melakukan penjajahan terhadap Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun, sedangkan Jepang melakukan penjajahan kepada Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun, untuk itu sebagai umat Islam tentunya perlu mengetahui bagaimana pendidikan Islam yang terjadi sebelum kemerdekaan dan pada masa kebijakan politik kolonial Belanda dan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana pendidikan Islam di nusantara sebelum terjadinya kemerdekaan Indonesia dan mengetahui bagaimana kebijakan politik yang terjadi pada masa kolonial Belanda dan Jepang terhadap pendidikan Islam di Indonesia.

## ABSTRACT

This study aims to find out how the development of Islamic education in the archipelago before Indonesian independence and how political policies during the Dutch colonial period towards Islamic Education in Indonesia. That Islamic education existed before Indonesia became independent, and grew after Indonesia became independent and the spread of religious figures in various regions in Indonesia. The Dutch colonized Indonesia for approximately 3.5 centuries or 350 years, while the Japanese colonized Indonesia for approximately 3.5 years, for that as Muslims certainly need to know how Islamic education occurred before independence and during the Dutch and Japanese colonial political policies. This research uses library research methods or literature studies. The results of the research that has been carried out are able to add insight and knowledge about how Islamic education in the archipelago before the occurrence of Indonesian independence and find out how political policies occurred during the Dutch and Japanese colonial periods towards Islamic education in Indonesia.

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia dimulai ketika Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-12 Masehi. Di abad ini, umat Islam telah membawa perubahan besar bagi para pencari ilmu yang belajar di Mekkah dan negara lain. Pengaruh pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan di Indonesia pada awal abad ke-19 memunculkan pemikiran modern yang dikenal dengan modernisasi. Ide ini lahir untuk meregenerasi pemikiran modern yang telah lama hilang oleh umat Islam sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kebangkitan Islam itu sendiri, banyak didirikan pesantren di Indonesia, tidak hanya mengajarkan bahasa Arab dan

\* [muthiaazizah013@gmail.com](mailto:muthiaazizah013@gmail.com)

menguasai kitab-kitab gundul, tetapi juga bahasa lain yaitu bahasa Inggris atau bahasa internasional lainnya.

Kemudian semenjak abad ke-20, *araetis* (*Etische Koers*) dijadikan landasan idiil dalam sistem pendidikan di Hindia Belanda. Sejalan dengan pokok pikiran yang terkandung di dalamnya, maka disusun pulalah dasar pikiran yang bertumpuh pada dua pokok pikiran yaitu: *pertama*, pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan bumi putera, *kedua* pemberian pendidikan terendah kepada golongan bumiputera, disesuaikan dengan tenaga kerja murah. Hal ini memberi kesan adanya peluang bagi kemungkinan terjadi penyimpangan pelaksanaan pendidikan dari tujuan yang termuat dalam politik etis. Para pelaksana pendidikan sendiri terkadang cenderung menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan moral itu sendiri. Dan adanya penjenisan sekolah yang menerima murid berdasarkan latar belakang status sosialnya merupakan bagian dari penyimpangan itu (Ramayulis, 2012).

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, termasuk perjuangan mengusir penjajah, umat Islam tidak dapat dipisahkan. Sebagai mayoritas masyarakat di negeri ini, umat Islam tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk menata dan membangun negeri ini. Dalam bidang pendidikan, para tokoh Islam meletakkan dasar-dasar pendidikan Islam yang tidak diterima oleh pemerintah kolonial pada masa penjajahan. Pendidikan Islam tidak tercantum sebagai disiplin ilmu, terutama di sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Karena itu, para pemimpin Islam mendirikan sekolah dan menampung umat Islam untuk pendidikan agama Islam (Nasution, 1992). Sebelum Belanda datang ke Indonesia dengan memperkenalkan sekolah-sekolah dan sistem modern sebagaimana berkembang di Barat, Indonesia sudah mempunyai sistem pendidikan formal yaitu sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam satu-satunya pendidikan formal yang ada pada masa itu memiliki sistem dan pengelolaan tersendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan yang dibawa oleh Belanda (Yunus, 1985) (Azmi dkk., 2023).

## 2. METODE

Métode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research* atau studi pustaka. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis kejadian, aktifitas sosial, pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok. Kemudian disimpulkan agar dapat dipahami dan dibaca dengan mudah. Sumber data yang digunakan adalah buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini merupakan sumber data yang digunakan dalam hasil dan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan yaitu mengambil buku-buku dan juga artikel yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas yaitu kebijakan politik pada masa kolonial Belanda terhadap Pendidikan Islam di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Politik Kolonial Belanda terhadap Pendidikan Islam di Indonesia

Belanda datang ke Indonesia dengan tiga tujuan, yaitu: *Pertama*, tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi; *kedua*, tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik, yaitu menguasai wilayah Indonesia; dan *ketiga*, tujuan untuk menyebarkan ideologi dan keagamaan. Ketiga macam tujuan tersebut secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut.

Tujuan yang bersifat ekonomi dari kedatangan Belanda ke Indonesia dimulai pada tahun 1595, yaitu berupa armada kapal dagang yang diutus oleh Perseroan Amsterdam.

Setelah itu menyusul kemudian angkatan kedua tahun 1598 di bawah pimpinan van Nede, van Heemskerck, dan Van Warwijck. Selain dari Amsterdam, datang juga beberapa kapal dari berbagai kota Belanda. Angkatan ketiga berangkat tahun 1599 di bawah pimpinan Van Der Hagen, dan angkatan keempat tahun 1600 di bawah pimpinan Van Neck (Sukmurdianto & Zulfa, 2020).

Adapun tujuan ekonomi dan politik terjadi setelah dibubarkannya VOC pada pergantian abad ke-18, dan secara resmi Indonesia pindah ke tangan pemerintah Belanda. Pemerintahan Belanda ini berlangsung sampai tahun 1942, dan hanya diselingi beberapa tahun oleh pemerintahan Inggris, yaitu pada tahun 1811-1816, dan sampai dengan tahun 1811 pemerintahan Belanda tidak mengadakan perubahan yang berarti. Pada tahun 1816, Belanda malah memanfaatkan daerah jajahannya untuk memberi keuntungan sebanyak-banyaknya kepada negeri induk, guna menanggulangi masalah ekonomi Belanda yang sedang mengalami kebangkrutan akibat perang. Pada tahun 1830, pemerintah Belanda menjalankan sistem tanam paksa. Dan setelah Terusan Suez dibuka dan industri di negeri Belanda sudah berkembang, pemerintah menerapkan politik liberal di Indonesia. Perusahaan dan modal swasta dibuka seluas-luasnya. Meskipun dalam politik liberal itu kepentingan dan hak pribumi mendapat perhatian, tetapi pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Baru pada tahun 1901 Belanda menerapkan politik balas budi.

Dengan demikian, beralihnya kekuasaan dari VOC ke pemerintah Belanda, menunjukkan bahwa Belanda tidak hanya ingin memperoleh keuntungan secara ekonomi, melainkan juga keuntungan secara politik.

Kedua macam tujuan ini tampak saling berkaitan. Dengan dikuasai wilayah Indonesia secara politik sangat mendukung kelancaran pencapaian tujuan yang bersifat ekonomi, sebaliknya dengan tercapainya tujuan ekonomi, juga mendukung tercapainya tujuan yang bersifat politik, karena untuk mencapai tujuan politik ini sangat membutuhkan ekonomi.

Selanjutnya tujuan ekonomi, politik, ideologi, dan keagamaan terjadi setelah Belanda secara ekonomi dan politik benar-benar telah mencapai tujuannya. Tujuan ini ditambah dengan tujuan yang bersifat ideologi dan keagamaan, yaitu tujuan untuk menanamkan budaya dan agama yang berkembang di Belanda dan Indonesia. Budaya hidup berfoya-foya, dansa-dansi, berpakaian, cara berpikir, cara berbuat, dan sikap tidak peduli pada masa depan Indonesia sangat ditanamkan oleh pemerintah Belanda melalui berbagai cara, antara lain melalui kegiatan pendidikan. Demikian pula agama yang mereka anut, yaitu Kristen Katolik mereka sebarluaskan di Indonesia dengan cara mengirim para misionaris ke berbagai daerah di Indonesia yang didukung dengan dana dan fasilitas yang memadai, dengan mendirikan gereja, dan membatasi kegiatan keagamaan Islam yang telah berkembang sebelumnya di Indonesia.

Ketiga tujuan kedatangan pemerintah Belanda ke Indonesia itu sering diungkapkan dengan istilah tri G, yaitu *Gold*, *Gospel*, dan *Glory*. *Gold* yang secara harfiah berarti emas, berkaitan dengan tujuan ekonomi. *Gospel* yang secara harfiah berarti Injil atau kitab suci adalah berkaitan dengan misi penyebaran agama Kristiani, dan *Glory* yang kejayaan adalah berkaitan dengan penguasaan dalam bidang politik dan kekuasaan, yakni bahwa Indonesia termasuk ke dalam wilayah kekuasaan pemerintah Belanda yang berarti berpusat di New Derland (Nata, 2020).

Politik yang dijalankan oleh pemerintah Belanda terhadap bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam didasari oleh rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya yaitu Kristen dan rasa kolonialismenya. Dengan begitu mereka menerapkan peraturan

dan kebijakan sebagai berikut: *pertama*, Pada tahun 1882 M pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut “Priesterraden.” Atas nasihat dari badan inilah maka pada tahun 1905 M pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran (baca: pengajian) harus minta izin terlebih dahulu. *Kedua*, Pada tahun 1925 M pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan Islam, yaitu bahwa tidak semua orang (kyai) boleh memberikan pengajaran. Peraturan ini diberlakukan karena adanya gerakan organisasi pendidikan yang sudah tampak tumbuh, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam (PSI), Al-Irsyad, dan lain-lain. *Ketiga*, Pada tahun 1932 M keluar pula peraturan yang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak diberikan izin untuk memberikan pengajaran atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (Wilde School Ordonantie). Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan Nasionalisme-Islamisme pada tahun 1928 M, yaitu berupa Sumpah Pemuda.

Jika dicermati peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang demikian ketat dan keras mengenai pengawasan, tekanan dan pemberantasan aktivitas madrasah dan pondok pesantren di Indonesia, maka seolah-olah dalam waktu yang tidak lama pendidikan Islam di Indonesia akan menjadi lumpuh dan porak poranda. Akan tetapi, apa yang disaksikan sejarah adalah kenyataan sebaliknya. Jiwa Islam tetap terpelihara dengan baik. Para ulama dan kyai bersikap non cooperative dengan Belanda dan mereka pun menyingkir dari tempat yang dekat dengan Belanda (Subandi dkk., 2023).

### 1. Pelaksanaan Pendidikan pada Masa Kolonial Belanda

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah di Hindia Belanda, pada dasarnya merupakan cerminan dari sistem pendidikan kolonial Belanda. Tujuan, ciri-ciri umum dan bentuk kelembagaan yang diterapkan di sekolah-sekolah tersebut, adalah merupakan realisasi dari sistem pendidikan yang mereka programkan. Adanya kaitan antara politik dan pendidikan, agaknya ikut menjadikan sistem pendidikan kolonial Belanda menjadi rumit. Keinginan untuk menerapkan prinsip deskriminasi, menyebabkan penjenisan sekolah menjadi banyak. Sebagai gambaran tentang sistem persekolahan itu, secara garis besarnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Jenis-jenis sekolah terdiri atas tiga: *pertama*, Pendidikan rendah (Lager Onderwijs), dibagi menjadi: Sekolah rendah berbahasa pengantar bahasa Belanda, yang terdiri atas: *pertama*, Sekolah Rendah Eropa (Eropeesche Lager School), *kedua*, Sekolah Bumiputera kelas satu, terdiri atas : *pertama*, Sekolah Cina Belanda (Hollandche Chinese school), *kedua*, Sekolah Bumiputera Belanda (Hollandche Inlandche School).

*Kedua*, Sekolah rendah berbahasa pengantar bahasa daerah, yang dibagi menjadi tiga, yaitu: *pertama*, Sekolah Bumiputera kelas dua (Inlandsche School Tweede Klasse), *kedua*, Sekolah Desa (Volkschool), *ketiga*, Sekolah peralihan (Vervolschool). *Ketiga*, Sekolah peralihan (Schakel School), sebagai sekolah peralihan dari Sekolah Desa ke Sekolah Dasar yang berbahasa pengantar bahasa Belanda. *Pertama*, Pendidikan menengah (Middlebaar Onderwijs) terdiri atas : Sekolah Menengah Umum, yaitu: (a) MULO (Meer Uitgereid Lager Onderwijs); dan (b) AMS (Algemene Middlebaar School), *kedua*, Sekolah Tinggi Warga Negara (Hogere Burgerschool), *pertama*, Pendidikan tinggi terdiri dari tiga jurusan, yaitu; *pertama*, Sekolah Tinggi Kedokteran, *kedua*, Sekolah Tinggi Hukum, *ketiga*, Sekolah Tinggi Teknik (Rukiati & Hikmawati, 2006).

Penjenisan sekolah di atas menunjukkan kenyataan akan adanya sikap deskriminatif dalam sistem pendidikan kolonial Belanda. Hal itu terlihat pada *pertama*, adanya penjenisan sekolah yang dikaitkan dengan status sosial berdasarkan keturunan. *Kedua*, masyarakat pribumi kurang diberi kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Pada sosial, pendidikan rendah, jenis sekolah lebih banyak dibandingkan dengan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dan keadaan yang seperti itu, tampaknya memang sudah diprogramkan, sehingga kesempatan masyarakat pribumi untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah menengah dan sekolah tinggi dibatasi. Selain itu, dalam usaha untuk menghambat kesempatan belajar itu, maka pemerintah memberlakukan pula persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga dari beberapa segi diduga memberatkan bagi murid-murid golongan pribumi. Barangkali data lulusan murid-murid tahun 1940 dapat memperkuat keabsahan itu. Dari 21.255 sekolah dasar dengan jumlah murid 88.233 orang, ternyata yang lulus 7.790 orang, yaitu sekitar 8,5% saja.

Lebih jauh tindakan deskriminatif dalam bidang pendidikan juga diterapkan dengan membedakan sekolah-sekolah menjadi sekolah untuk orang Eropa, Cina dan Bumiputera, Dengan demikian, dari berbagai segi, kesempatan belajar bagi penduduk pribumi di sekolah-sekolah pemerintah senantiasa mendapat hambatan (Ramayulis, 2012).

## 2. Sistem Pendidikan Islam

Sejalan dengan kepentingan politik kolonial Belanda itu, maka sistem pendidikan di masa kolonial Hindia Belanda disusun berdasarkan kepentingan Belanda sebagai penjajah. Paling tidak, dalam pandangan mereka sistem pendidikan harus memberi gambaran adanya unsur pembeda antara pendidikan kolonial dengan pendidikan pribumi. Untuk membedakan status antara penjajah dan pribumi mereka memasukkan unsur diskriminasi dalam sistem pendidikan, sedangkan tujuan jangka panjang dalam menjaga kemantapan politik penjajahan, mereka mengusahakan agar di sekolah-sekolah tidak menerapkan pendidikan agama. Sekolah yang netral agama menurut pandangan pemerintahan paling tidak memiliki tujuan ganda. *Pertama*, untuk menghindari anggapan bahwa penguasa (kristen) pemerintah tidak memihak kepentingan *Missie* dan *Zendig* atau tidak berkeinginan mengembangkan agama kristen melalui sekolah. *Kedua*, secara berangsur-angsur dan terarah menjauhkan rakyat pribumi dan keterikatan dengan ajaran mereka (Islam) melalui sekolah-sekolah pemerintah yang netral agama (Ramayulis, 2012).

Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan pendidikan Bumiputera, karena yang memasuki pendidikan Islam pada kolonial ini seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda terbagi menjadi tiga yaitu: *pertama*, Sistem Pendidikan Peralihan Hindia Belanda, yaitu sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Sistem ini dilaksanakan dengan cara, guru mendatangi murid-muridnya. yang menjadi murid-muridnya adalah anak-anak para bangsawan dan kalangan keraton. Sebaliknya, sistem *pertapa*, para murid mendatangi guru ke tempat pertapaannya. adapun murid-muridnya tidak lagi terbatas pada golongan bangsawan dan kalangan keraton, tetapi juga termasuk rakyat jelata.

*Kedua*, Sistem Pendidikan Surau, yaitu sebelum tahun 1900 kita mengenal pendidikan Islam secara perseorangan, melalui rumah ke rumah dan melalui

surau/langgar atau mesjid. Pendidikan secara perseorangan dan rumah ini lebih mengutamakan pelajaran praktis, misalnya tentang ketuhanan, keimanan, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah. Belum ada pemisah mata pelajaran tertentu dan pelajaran yang diberikan pun belum sistematis (Amin, 2019) (Subandi dkk., 2023).

Sistem pendidikan di Surau tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas, murid dibedakan sesuai dengan tingkat keilmuannya, proses belajarnya tidak kaku, muridnya diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana yang ia kehendaki. Dalam proses pembelajaran murid tidak memakai meja ataupun papan tulis yang ada hanya, kitab kuning merupakan sumber utamanya dalam pembelajaran.

Metode utama dalam proses pembelajaran di Surau dengan memakai metode ceramah, membaca dan menghafal. Materi pembelajaran yang diberikan Syeikh kepada murid dilaksanakan sambil duduk dilantai dalam bentuk setengah lingkaran. Syeikh membacakan materi pembelajaran, sementara murid menyimakinya dengan mencatat beberapa catatan penting di sisi kitab yang dibahasnya atau dengan menggunakan buku khusus yang telah disiapkan oleh murid. Sistem seperti ini terkenal dengan istilah Halaqah.

*Ketiga*, Sistem Pendidikan Pesantren yaitu metode yang digunakan adalah metode sorogan, atau layanan individual yaitu bentuk belajar mengajar dimana Kiyai hanya menghadapi seorang santri yang masih dalam tingkatan dasar atau sekelompok kecil santri yang masih dalam tingkatan dasar. Tata caranya adalah seorang santri menyodorkan sebuah kitab di hadapan kiyai, kemudian kiyai membacakan beberapa bagian dari kitab itu, lalu santri mengulangi bacaan sampai santri benar-benar membaca dengan baik. Bagi santri yang telah menguasai materi lama, maka ia boleh menguasai materi baru lagi (Amin, 2019).

Metode wetonan dan bandongan, atau layanan kolektif ialah metode mengajar dengan sistem ceramah. Dalam metode ini kyai biasanya membacakan, menerjemahkan, lalu menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dari suatu kitab dan para santri menyimak bacaan kyai sambil membuat catatan penjelasan di pinggir kitabnya. Metode Musyawarah adalah belajar dalam bentuk seminar (diskusi) untuk membahas setiap masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaranpelajaran santri ditingkat tinggi. Metode ini menekankan keaktifan pada pihak santri, yaitu santri harus aktif mempelajari dan mengkaji sendiri buku yang telah ditentukan kiyainya. Kiyai harus menyerahkan dan memberi bimbingan seperlunya (Ramayulis, 2012).

Di masa kolonial, pendidikan Islam hanya terbatas pada pesantren dan surau dan masih bersifat tradisional. Kemudian pada 1909 madrasah pertama di Indonesia muncul yaitu Madrasah Adabiyah di Kota Padang, Sumatera Barat, didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad. Setelah itu madrasah-madrasah lain pun tumbuh berdiri. Seperti Madrasah Shcoel yang didirikan pada 1910 di Kota Batu Sangkar, Sumatera Barat oleh Syekh M. Talib Umar. Lalu pada 1912 Muhammadiyah di Yogyakarta, didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan dkk dan mereka mulai membangun sistem lembaga pendidikan yang menggabungkan pendidikan Islam dan umum. Berturut-turut setelah itu pada 1913 ada Madrasah Al Irsyad di Jakarta, didirikan oleh Syeikh Ahmad Sokarti. Kemudian pada 1915 muncul Diniyah Schoel di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, didirikan oleh Zainuddin Labai el Janusi (Sus, 2013).

Berikutnya pada 1926, salah satu organisasi Islam terbesar Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya oleh K.H. Hasyim Asyari, K.H. Wahab Hasbullah dan setelah itu mulai banyak mendirikan madrasah sebagai embrio sejarah madrasah di Indonesia. Madrasah berkembang di Jawa mulai 1912 saat berdirinya organisasi Muhammadiyah. lalu ada model madrasah pesantren NU dalam bentuk Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha, dan Muallimin Ulya. Ada model AL Irsyad (1913) yang mendirikan Madrasah Tajhiziyah, Muallimin dan Tahassus, atau model Madrasah PUI di Jabar yang mengembangkan madrasah pertanian.

Belanda tentu saja resah akan perkembangan madrasah, lalu keluarlah peraturan yang menetapkan madrasah sebagai “sekolah liar”, kemudian mengeluarkan sejumlah peraturan yang melarang atau membatasi madrasah. Pada 1915 berdiri madrasah bagi kaum perempuan, yaitu Madrasah Diniyah putri yang didirikan Rangkayo Rahmah Al-Yunisiah. Zaiuniddin Labai ini juga yang pertama kali mendirikan Persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI) di Minangkabau pada 1919 (Subandi dkk., 2023).

#### 4. KESIMPULAN

Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia setidaknya ada tiga macam. *Pertama*, tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi; *kedua*, tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik, yaitu menguasai wilayah Indonesia; dan *ketiga*, tujuan untuk menyebarkan ideologi dan keagamaan. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh Belanda sangat berbeda dengan sistem pendidikan yang diterapkan oleh Jepang begitu juga dengan sistem jenjang pendidikannya

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2019). Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda dan Jepang. *PILAR*, 10(2). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/5021>
- Azmi, M., Rama, B., & Razaq, A. R. (2023). Pendidikan Islam di Indonesia Pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang. *IQRA: Jurnal Magister Pendidikan Islam*, 3(01), 56–75.
- Nasution, H. (1992). *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nata, A. (2020). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ramayulis. (2012). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rukiati, E. K., & Hikmawati, F. (2006). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: CV Persada Karya.
- Subandi, S., Rama, B., & Achruh, A. (2023). Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Zaman Penjajahan Belanda Dan Jepang. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 193–205.
- Sukmurdianto, S., & Zulfa, M. Y. (2020). Kebijakan Pendidikan Islam Di Nusantara Sebelum Kemerdekaan: Kasus Kebijakan Politik Kolonial Belanda Dan Jepang Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia. *Mau'izhah*, 10(2), 143. <https://doi.org/10.55936/mauizhah.v10i2.39>

Sus, S. (2013). Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda dan Jepang. *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 1(01). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/654>

Yunus, M. (1985). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hadikarya.